

**EVALUASI MANAJEMEN LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG**

**Tesis**

Oleh

**ARIS WIDODO  
NPM 2126021019**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**EVALUASI MANAJEMEN LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG**

**Oleh**

**ARIS WIDODO**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI MANAJEMEN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG**

**Oleh**

**Aris Widodo**

Terdapat persoalan logistik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang. Persoalan tersebut adalah kekurangan surat suara pemilu, surat suara pemilu yang tertukar antar dapil dan surat suara salah cetak di beberapa tempat pemungutan suara yang mengakibatkan sejumlah pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sehingga dilaksanakan pemungutan suara lanjutan.

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi manajemen logistik Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Palembang dari aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek penggerakan dan aspek pengawasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data bersumber dari hasil wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) (POAC) dari George R. Terry.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan logistik Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian perencanaan tersebut tidak optimal dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyiapkan gudang logistik pemilu yang representatif yang dapat menampung keseluruhan logistik pemilu serta lokasi gudang tidak berada dalam satu kawasan. Hal itu menyulitkan pengelolaan logistik pemilu dan pengawasannya. 2) Pengorganisasian sudah berjalan dengan baik. Seluruh pegawai melaksanakan tugasnya sesuai *jobdesk* namun tidak optimal karena jumlah pegawai sekretariat KPU Kota Palembang terbatas. 3) Penggerakan sudah berjalan baik sesuai dari perencanaan namun tidak optimal karena masih terdapat kekurangan surat suara pemilu, surat suara tertukar antar dapil dan surat suara salah cetak. 4) Pengawasan sudah berjalan dengan baik mulai dari pengawasan internal dari KPU Kota Palembang maupun pengawasan eksternal dari Bawaslu Kota Palembang namun tidak optimal karena keterbatasan jumlah pengawas, terutama pengawasan di bagian penyortiran, pelipatan, pengesetan dan pengepakan logistik Pemilu Tahun 2019.

**Kata Kunci:** evaluasi, manajemen, logistik pemilu, Kota Palembang

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF LOGISTICS MANAGEMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTION IN PALEMBANG CITY**

**By**

**Aris Widodo**

There are logistical problems in holding the 2019 election in Palembang City. These problems were a shortage of election ballot papers, election ballot papers being mixed up between electoral districts and misprinted ballot papers at several polling stations which resulted in a number of voters not being able to exercise their right to vote so further voting was carried out. The aim of this research is to evaluate the logistics management of the 2019 Election by the Palembang City KPU from the planning aspect, organizing aspect, mobilization aspect and supervision aspect. The research method used is descriptive qualitative. Data comes from interviews with informants and documentation. The theory used is planning, organizing, actuating and controlling (POAC) from George R. Terry. The research results show that: 1) The logistics planning from the 2019 Election carried out by the Palembang City KPU has gone well. However, this planning was not optimal because the Palembang City KPU did not prepare a representative election logistics warehouse that could accommodate all election logistics and the warehouse location was not in one area. This makes it difficult to manage election logistics and supervision. 2) The organization has gone well. All employees carry out their duties according to the job desk, but this is not optimal because the number of employees at the Palembang City KPU secretariat is limited. 3) The movement has gone well according to the plan but is not optimal because there is still a shortage of election ballot papers, ballot papers have been swapped between electoral districts and ballot papers have been misprinted. 4) Supervision has been running well, starting from internal supervision from the Palembang City KPU and external supervision from the Palembang City Bawaslu, but it is not optimal due to the limited number of supervisors, especially supervision in the sorting, folding, setting and packing of logistics for the 2019 Election.

Keywords: evaluation, management, election logistics, Palembang City

Judul Tesis : EVALUASI MANAJEMEN LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KOTA PALEMBANG  
Nama Mahasiswa : Aris Widodo  
Nomor Pokok Mahasiswa: 2126021019  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P, M.A**  
NIP. 1978804302005011002


**Dr. Tabah Maryanah, M.Si**  
NIP. 197106042003122002

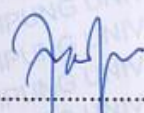
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

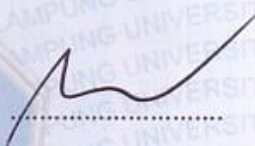
**Dr. Feni Rosalia, M.Si**  
NIP. 196902191994032001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P, M.A**.....


Sekretaris : **Dr. Tabah Maryanah, M.Si**.....

Penguji : **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A**.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP.196108071987032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

  
**Prof. Dr. H. Murhadi, M.Si.**  
NIP.196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **24 Oktober 2023**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan Judul: **EVALUASI MANAJEMEN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Aris Widodo**  
**2126021019**

## RIWAYATHIDUP



Penulis dilahirkan di Lahat, pada tanggal 17 Maret 1980. Penulis merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak R. Sukiyatno(alm). dan Ibu Kustina (alm).Almamater pendidikan penulis di antaranya: SD Negeri 193 Kota Jambi, SLTP PGRI 3 Kota Jambi, SMU Ferdy Fery Putra Kota Jambi, dan S1 Ilmu Hukum Universitas Jambi.

Penulis kemudian melanjutkan Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, konsentrasi Tata Kelola Pemilu melalui program beasiswa Magister Tata Kelola Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia batch VII Tahun 2021. Sebelumnya penulis pernah bekerja di beberapa kantor Notaris dan PPAT diantaranya di Kota Jambi, di Kabupaten Muaro Jambi dan di Kota Palembang. Kemudian pada Tahun 2010, penulis lulus penerimaan CPNS Sekretariat KPU RI dan ditempatkan untuk pertama kalinya di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada Tahun 2015, penulis bekerja di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin dan pada tahun 2019 sampai sekarang, penulis bekerja di di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan.



“Apabila seseorang bekerja sebagai penyapu jalanan, ia harus menyapu jalan, bahkan seperti Michelangelo melukis, Beethoven mencipta musik, atau Shakespeare menulis puisi. Ia harus menyapu dengan begitu baik sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti untuk berseru “Di sini hidup seorang penyapu jalan yang luar biasa yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik”

**(Martin Luther King, Jr)**

## **PERSEMBAHAN**

Mengucapkan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada Penulis, atas selesainya Tesis ini dan sayapersembahkan untuk:

Terkhusus:

**Untuk Istri dan Anak-anakku**

yang tiada lelah memberikan percikan api semangat kepada penulis

Serta:

**Dosen dan Almamater**

Universitas Lampung

yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan serta motivasi selama perkuliahan kepada Penulis

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan pendidikan program magister Tata Kelola Pemilu batch VII Tahun 2021

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Karunia dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Evaluasi Manajemen Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dariberbagai pihak, sulit untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afiani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof.Dr.Ir.Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra.IdaNurhaida,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Lampung.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si.selaku Ketua Program Studi MagisterI lmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Lampung.
5. BapakDr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P, M.A., selakuPembimbingUtamaatas kesediannya memberikan bimbingan, saran dan masukannya dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. IbuDr.TabahMaryanah,M.Si. selakuPembimbingpendampingyang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A, selakupenguji utama pada ujian tesis ini. Terima kasih atas masukan dan saran-saran pada seminar proposal dan seminar hasil terdahulu.
8. Bapak dan Ibu DosenProgramStudiMagisterIlmuPemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Lampung.

9. Bapak dan Ibu Sdr/Sdri Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
10. Bapak/Ibu informan atas kesediannya dan meluangkan waktunya dalam kegiatan penelitian ini.
11. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pemberi beasiswa Tata kelola Pemilu;
12. Bapak/Ibu pimpinan, Sekretaris, Kasubbag dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara atas dukungannya kepada penulis selama menempuh pendidikan pascasarjana di Program Studi Magister Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa program studi pascasarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama perkuliahan maupun dalam penyusunan tesis;
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungan dan do'anya sehingga dapat diselesaikan tesis ini.

Bandar Lampung, Oktober 2023

Aris Widodo

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Manajemen Logistik Pemilu.....	9
2.1.1Pengertian Manajemen .....	11
2.1.2 Fungsi Manajemen.....	11
2.2 Pengertian Evaluasi .....	17
2.2.1Fungsi Evaluasi.....	18
2.2.2 Jenis Evaluasi.....	18
<b>BAB IIIMETODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1. Tipe Penelitian .....	20
3.2. Fokus Penelitian.....	20
3.3. Sumber Data .....	21
3.4. Penentuan Informan.....	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	24
3.7. Teknik Keabsahan Data .....	25
<b>BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang.....	27
4.2 Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang .....	27

4.2.1 Perencanaan .....	34
4.2.1.1 Perencanaan penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2019 .....	35
4.2.1.2 Perencanaan penerimaan logistik Pemilu Tahun 2019 .....	38
4.2.1.3 Perencanaan Kegiatan Sortir, Pelipatan, pengesetan dan Pengepakan logistik Pemilu Tahun 2019 .....	42
4.2.1.4 Perencanaan mekanisme distribusi logistik Pemilu Tahun 2019 .....	44
4.2.2 Pengorganisasian.....	47
4.2.3 Penggerakan .....	58
4.2.3.1 Pelaksanaan penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2019.....	59
4.2.3.2 Pelaksanaan Penerimaan Logistik Pemilu Tahun 2019 .....	63
4.2.3.3 Pelaksanaan Kegiatan Sortir, Pelipatan, Pengesetan dan Pengepakan logistik Pemilu Tahun 2019.....	68
4.2.1.4 Pelaksanaandistribusi logistik Pemilu Tahun 2019.....	83
4.2.4 Pengawasan .....	92
4.2.5 Optimalisasi Manajemen Logistik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Palembang .....	97
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	110
5.1 Simpulan .....	110
5.2 Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113
<b>LAMPIRAN(A)</b> .....	121
<b>LAMPIRAN(B)</b> .....	181

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian jumlah Tempat Pemungutan Suara Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.....	4
Tabel 2 Rincian jumlah kekurangan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.....	4
Tabel 3 Rincian jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.....	5
Tabel 4 Teknik pengumpulan data dan Objek Penelitian.....	24
Tabel 5 Luas wilayah di Kota Palembang Tahun 2019.....	28
Tabel 6 Jumlah Penduduk di Kota Palembang Tahun 2019, 2020, 2021.....	29
Tabel 7 Kepadatan Penduduk di Kota Palembang Tahun 2019, 2020, 2021.....	30
Tabel 8 Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.....	33
Tabel 9 Jumlah Badan Ad hoc pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang.....	52
Tabel 10 Penerimaan formulir C 1 dan Plano.....	63
Tabel 11 Penerimaan formulir C 1 berhologram.....	64
Tabel 12 Penerimaan surat suara Pemilu Tahun 2019 Tahap 1.....	64
Tabel 13 Penerimaan surat suara Pemilu Tahun 2019 Tahap 2.....	65
Tabel 14 Penerimaan formulir, daftar pasangan calon dan alat bantu coblos Pemilu Tahun 2019.....	66
Tabel 15 Penerimaan sampul surat suara Pemilu Tahun 2019.....	66
Tabel 16 Penerimaan kotak suara dan bilik suara Pemilu Tahun 2019.....	67
Tabel 17 Hasil sortir dan pelipatan surat suara Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang.....	73
Tabel 18 Surat suara untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.....	75
Tabel 19 Surat suara untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.....	76

Tabel 20 Surat suara untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.....	77
Tabel 21 Surat suara untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Palembang.....	78
Tabel 22 Surat suara untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.....	79
Tabel 23 Logistik pemilu tahun 2019 di dalam kotak suara di tingkat TPS.....	80
Tabel 24 Logistik pemilu tahun 2019 di luar kotak suara di tingkat TPS.....	81
Tabel 25 Logistik pemilu tahun 2019 di luar kotak suara di tingkat PPS.....	82
Tabel 26 Logistik pemilu tahun 2019 di tingkat PPK.....	82
Tabel 27 Logistik pemilu tahun 2019 di tingkat KPU.....	83
Tabel 28 Jadwal Pendistribusian Logistik pada pemilu tahun 2019 di Kota Palembang.....	86
Tabel 29 Jumlah surat suara pemilu sisa dan surat suara rusak yang dimusnahkan oleh KPU Kota Palembang.....	87
Tabel 30 Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024.....	101



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur penerimaan logistik Pemilu Tahun 2019 di KPU Kota Palembang.....	39
Gambar 2 Alur pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang.....	47
Gambar 3 Bagan struktur organisasi KPU Kota Palembang Tahun 2019.....	49
Gambar 4 Bagan struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Palembang Tahun 2019.....	50
Gambar 5 Gudang logistik milik KPU Kota Palembang pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019.....	61
Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Hepriyadi, SH, MH selaku anggota KPU Propinsi Sumatera Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan.....	129
Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Syawaludin, S.H.I selaku Ketua KPU Kota Palembang.....	134
Gambar 8 Wawancara dengan Bapak Eko Kusandi, S.Sos, M.Si selaku Anggota Bawaslu Kota Palembang Divisi penanganan pelanggaran dan Datin.....	138
Gambar 9 Wawancara dengan Bapak Sudarmawan selaku staf divisi teknis Bawaslu Kota Palembang pelanggaran dan Datin.....	142
Gambar 10 Wawancara dengan saudara Dhoni Rozitra, S.Kom, M.IP selaku Pegawai Sekretariat KPU Kota Palembang.....	152
Gambar 11 Wawancara dengan Bapak Khairul dan Bapak H. Sarifudin selaku anggota PPK Ilir Timur II Kota Palembang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.....	163
Gambar 12 Tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2019 di PPK Ilir Timur II Kota Palembang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.....	164

Gambar 13	Wawancara dengan Bapak A. Rahman Yakob selaku anggota KPPS RT Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.....	158
Gambar 14	Wawancara dengan Sri Yuliani, S.Pd AUD pemilih di TPS RT 23 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang .....	171
Gambar 15	Wawancara dengan Ibu Rohana, pemilih di TPS RT 6 Lebak Bakung Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang .....	174
Gambar 16	Wawancara dengan Bapak Nana, Bapak Roni, Bapak Syaiful Anwar, S.Sos, pemilih pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang.....	178

**DAFTAR SINGKATAN**

BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KAB	: Kabupaten
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERPU	: Peraturan Pemerintah
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PPHP	: Petugas Penerima Hasil Pekerjaan
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
POKJA	: Kelompok Kerja
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PSL	: Pemungutan Suara Lanjutan
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
RI	: Republik Indonesia
SILOG	: Sistem Informasi Logistik
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kedaulatan rakyat merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi (Jurdi, 2018). Pemilihan Umum selanjutnya ditulis pemilu, bukan satu-satunya instrumen demokrasi, namun pemilu merupakan instrumen yang sangat penting (Santoso, 2019). Pemilu yang demokratis mencakup yaitu pertama, pemilu dilakukan secara demokratik untuk memberi ruang kompetisi yang jujur, fair dan adil, kedua yaitu produk pemilu harus lebih baik, lebih berkualitas, mandiri dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, selanjutnya yang ketiga yaitu derajat keterwakilan dengan adanya perimbangan yang adil antara pusat dan daerah, keempat yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pemilu harus tuntas dan kelima yaitu pelaksanaan pemilu bersifat praktis, tidak rumit dan mudah dipahami serta dimengerti oleh rakyat (Gaffar, 2000).

Menurut Ramlan Surbakti (Ilham Teguh, 2017) terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu yaitu pertama sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dalam demokrasi, penyeleksian dan pendelegasian kepada orang atau partai yang dipercaya kemudian yang kedua, sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai yang memenangkan kursi sehingga terjaminnya integrasi di masyarakat, terakhir yang ketiga yaitu pemilu sebagai sarana memobilisasi dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik.

Kualitas pemilu menjadi salah satu indikator kesuksesan demokrasi, kualitas dan integritas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemilu yang berkualitas dapat dinilai dari proses tata kelola pemilu, menurut Norris (2013) pemilu yang berintegritas merujuk pada terpenuhinya penyelenggaraan pemilu sesuai standar dan norma pemilu yang berlaku secara

universal. Norma universal yaitu antara lain sebagai berikut: 1. pemilu periodik, 2. Hak pilih universal, 3. Prinsip satu orang satu suara, 4. Hak untuk mencalonkan dan kompetisi dalam pemilu, 5. Hak pemilih sah untuk dapat menggunakan suaranya, 6. Hak penyuaaran yang bersipat rahasia, 7. pemilu yang sesungguhnya, 8. pemilu yang merupakan ekspresi kehendak rakyat.

Menurut Ahmad S. Mustafa (Rahmatunnisa, 2017) dampak negatif yang diakibatkan oleh pemilu yang tidak berintegritas dapat menghilangkan kompetisi antar peserta pemilu, menguatnya apatisisme pemilih dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut pada akhirnya akan membatalkan pemilu yang tidak tercapainya akuntabilitas dan legitimasi pemimpin yang terpilih hasil dari pemilu (Rahmatunnisa, 2017).

Ramlan Surbakti (2016) berpandangan bahwa pemilu serentak diselenggarakan untuk memilih pejabat publik dari beberapa lembaga sekaligus secara bersamaan. Ketentuan ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memberikan harapan baru, bahwa pemilu serentak atau lazim juga disebut pemilu konkruen (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan yang menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas presidensial (Efriza, 2019).

Pemilu berkualitas setidaknya tercermin dari beberapa hal yang terkait langsung dengan proses, penyelenggaraan dan hasil pemilu. Seluruh tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terkecuali terselesaikannya seluruh keperluan logistik pemilu (Hidayaturrahman dan Ubaid, 2021).

Permasalahan logistik pemilu yang banyak terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu diantaranya terdapat kekurangan atau kelebihan surat suara/sampul/segel/formulir dan sejenisnya. Kemudian pengiriman surat suara tertukar antar daerah pemilihan serta berbagai logistik pendukung lainnya yang rusak (Aja, 2021). Terdapat ketidaksesuaian jumlah logistik pemilu yang dimanifestasikan dengan fisiknya, ketidakteletian dan kecermatan pada saat melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara. Selanjutnya ketidakteletian

dan ketepatan pada saat memasukkan logistik pemilu ke dalam kotak suara dan terdapat kerusakan logistik disebabkan gudang tempat penyimpanan tidak memenuhi standar kelayakan (Aja, 2021).

Menurut lehoucg (Khalyubi, Amrurobi dan Pahlevi, 2020)kekurangan logistik pemilu dapat berimplikasi pada proses pemungutan suara sehingga berpotensi memunculkan asumsi ditengah masyarakat terkait *electoral fraud* atau disebut juga dengan kecurangan pemilu sebagai upaya klandestin untuk membentuk hasil pemilu.Beberapa permasalahan yang cukup menjadi perhatian pada pemilu serentak tahun 2019 salah satu diantaranya penanganan logistik pemilu. Secara nasional tercatat ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik dan terdapat surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan ataupun antar TPS, berdasarkan data Bawaslu kasus ini terjadi di 3.411 TPS (Boediningsih dan Cahyono, 2022).

Terdapat permasalahan logistik pemilu tahun 2019 yang terjadi di Kota Palembang dimana terdapat kekurangan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di beberapa TPS yaitu di kecamatan Ilir Timur II. Berdasarkan temuan Panitia Pengawas Kecamatan Ilir Timur II di 70 TPS dari 193 TPS di kecamatan Ilir Timur yang tersebar di beberapa kelurahan yaitu: Kelurahan 1 Ilir Timur, Kelurahan 2 Ilir Timur II, Kelurahan 5 Ilir, Kelurahan Lawang Kidul dan Kelurahan Sungai Buah. (<https://regional.kompas.com>)

Berdasarkan data dari KPU Kota Palembang tahun 2019 jumlah tempat pemungutan suara untuk masing-masing kecamatan di Kota Palembang pada pemilihan umum tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 1 (satu) Rincian jumlah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1 : Rincian jumlah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang**

Nomor	Kecamatan	Jumlah Tempat Pemungutan Suara
1	Iilir Barat II	193
2	Gandus	195
3	Seberang Ulu I	293
4	Kertapati	279
5	Jakabaring	258
6	Seberang Ulu II	252
7	Plaju	248
8	Iilir Barat I	457
9	Bukit Kecil	126
10	Iilir Timur I	205
11	Kemuning	259
12	Iilir Timur II	237
13	kalidoni	361
14	Iilir Timur Tiga	225
15	Sako	298
16	Sematang Borang	144
17	Sukarami	486
18	Alang-alang Lebar	289
	<b>Total</b>	<b>4.805</b>

Sumber : KPU Kota Palembang Tahun 2019

Dari tabel 1 (satu) Rincian jumlah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang, hal ini menunjukkan sekitar kurang lebih 36% (tiga puluh enam persen) dari kekurangan surat suara tersebut di 193 TPS di Kecamatan Iilir Timur II. Selanjutnya temuan dari Panwaslu Iilir Timur II terdapat kekurangan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 7.210 surat suara dari 47.142 total DPT pemilu tahun 2019 di kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang. Adapun rincian kekurangan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di kecamatan Iilir Timur 2 Kota Palembang dapat dilihat dalam tabel 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2: Rincian jumlah kekurangan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang**

Nomor	Kelurahan	Jumlah Kekurangan surat suara
1	1 ilir Timur 1	59
2	2 Iilir Timur 2	2.847
3	5 ilir	99
4	Lawang Kidul	937
5	Sungai Buah	3.268
	<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>7.210</b>

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor :1071/Pid.B/2019/PN PLG(P. N. Palembang, 2019)

Berdasarkan data dari KPU Kota Palembang tahun 2019 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang untuk masing-masing kecamatan di Kota Palembang pada pemilihan umum tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3 (tiga) tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.

**Tabel 3: Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang**

Nomor	Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Iilir Barat II	23.44	23.693	47.142
2	Iilir barat I	48.511	49.741	98.252
3	Bukit Kecil	16.525	17.891	34.416
4	Gandus	23.291	22.499	45.790
5	Sukarami	54.659	56.855	111.514
6	Kemuning	28.640	29.738	58.378
7	Alang-alang	29.496	30.607	60.193
8	Iilir Timur I	25.739	27.878	53.617
9	Iilir timu II	31.246	32.559	63.805
10	Iilir Timur III	27.322	27.946	55.268
11	Sako	32.377	33.188	65.565
12	Kalidoni	39.810	40.366	80.176
13	Sematang Borang	17.800	17.492	35.292
14	Seberang Ulu II	33.274	32.986	66.260
15	Plaju	33.329	33.767	67.096
16	Seberang Ulu I	31.160	30.568	61.728
17	Kertapati	31.455	31.249	62.704
18	Jakabaring	29.178	29.713	58.891
Jumlah Keseluruhan		<b>557.261</b>	<b>568.826</b>	<b>1.126.087</b>

Sumber : KPU Kota Palembang Tahun 2019

Dari tabel 3 (tiga) tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang tersebut menunjukkan bahwa kekurangan surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terbilang cukup besar, sekitar kurang lebih 15% (lima belas persen) dari 47.142 DPT di kecamatan Iilir Barar II Kota Palembang pada pemilu tahun 2019. Terkait permasalahan kekurangan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Tahun 2019 tersebut, maka ketua dan anggota KPU Kota Palembang diberhentikan sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan putusan Dewan Kehormatan (DKPP) Nomor:147-PKE-DKPP/VI/2019 (<https://dkpp.go.id>).



Penanganan logistik pemilu maupun pemilihan kepala daerah serta pemilihan kepala daerah serentak dimasa covid-19 sudah banyak dikaji dan dibahas, pertama pada masa penyelenggaraan pemilu diantaranya oleh (Mariska et al., 2021) keterlambatan distribusi logistik pemilu tahun 2019 di Kota Medan disebabkan pada hari pendistribusian masih terjadi sortir lipat suara dan pengepakan dimana tidak sesuai jadwal pendistribusian yang ditetapkan oleh KPU Kota Medan. Selanjutnya oleh (Gaol, 2022) menyatakan terdapat kurangnya komunikasi antara pihak KPU Kota Balikpapan dengan KPU RI beserta dengan penyedia logistik yang menyebabkan ada sebagian kelengkapan logistik yang pengadaannya terlambat. Berikutnya adanya campur tangan komisioner dalam hal pengadaan serta kurangnya kirim surat suara dari pihak penyedia menyebabkan terlambatnya logistik (Gaol, 2022).

Penelitian logistik pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh (Sari, Hertanto dan Warganegara, 2018) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Pagar Alam menerapkan manajemen strategi pendistribusian logistik dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kelemahan (*weaknesses*) dan kekuatan (*strengths*) dalam pengolahan dan distribusi logistik. Adapun kelemahan (*weaknesses*) terdapat kelalaian manusia yang melakukan tiga pekerjaan sekaligus selanjutnya kekuatan (*strengths*) dimana KPU Kota Pagar Alam memiliki SDM yang berpengalaman pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Kepala daerah. Selanjutnya ancaman (*threats*) terdapat faktor hujan yang tergolong tinggi dan geografis daerah pegunungan kemudian keuntungan (*opportunities*) dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar (Sari, Hertanto dan Warganegara, 2018).

Penelitian pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dimasa covid-19 yang dilakukan oleh (Aja, 2021) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan logistik pemilu dan pengadaan alat pelindung diri (APD) memberikan resiko yang cukup besar dalam penyebaran wabah covid-19. Kesuksesan pengelolaan logistik pemilu di masa covid-19 tidak terlepas dari peran KPU Manggarai dalam mengatur logistik pemilihan dan APD mulai dari perencanaan dan kebutuhan anggaran, pengadaan, pendistribusian hingga

inventarisasi dan pemeliharaan logistik yang semuanya dilakukan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen.

Penelitian dari (Khalyubi, Amrullohi, dan Pahlevi, 2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penentuan daerah prioritas dengan menyandingkan data persebaran pandemi covid-19 dalam pendistribusian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ditengah pandemi covid-19.

Sama halnya dengan penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan membahas logistik pemilu tahun 2019 serupa yang dibahas oleh beberapa penelitian terdahulu tetapi penelitian ini berbeda dari (Khalyubi, Amrullohi, dan Pahlevi, 2020), (Aja, 2021) dan (Sari, Hertanto dan Waganegara, 2018) yang membahas penanganan logistik pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelum dan pada masa covid-19. Kemudian penelitian dari (Mariska et al., 2021) dan (Gaol, 2022) yang mana dari kedua penelitian tersebut keterlambatan dan kekurangan surat suara disebabkan keterlambatan dari pihak penyedia sehingga mengganggu jadwal pendistribusian namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini lebih spesifik pada evaluasi manajemen logistik pada pemilu tahun 2019 di Kota Palembang dengan menggunakan teori dari George R. Terry yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Peneliti menggunakan teori POAC karena fungsi-fungsi didalamnya mampu melihat fenomena yang terjadi pada manajemen logistik Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palembang secara lebih luas dan mendalam sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya yaitu terdapat persoalan logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang seperti kekurangan surat suara pemilu, surat suara pemilu tertukar antar dapil, surat suara pemilu salah cetak maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah hasil evaluasi manajemen logistik Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Palembang dari aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pergerakan dan aspek pengawasannya?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi manajemen logistik Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Palembang dari aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek penggerakan dan aspek pengawasannya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan manajemen logistik pemilu.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada KPU, Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu terkait manajemen logistik pemilu maupun pilkada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Manajemen Logistik Pemilu**

Menurut Martono (Prayitno dan Fairus, 2022) manajemen logistik merupakan metode untuk mengatur aliran masuk bahan mentah secara tepat, pengolahan dan pengiriman barang jadi sesuai dengan permintaan konsumen. Manajemen logistik terintegrasi mulai dari persiapan bahan mentah, proses pengolahan bahan mentah menjadi barang dan proses pengiriman sampai barang jadi diterima konsumen. Selanjutnya Prihantono (Prayitno dan Fairus, 2022) menjelaskan terdapat tujuh fungsi penting manajemen logistik secara umum yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi perencanaan dan persyaratan

Manajemen logistik berfungsi sebagai perancang dan penentu kebutuhan setiap program organisasi yang meliputi kegiatan analisis produk yang akan digunakan, ketersediaan dan skala prioritas. Kegiatan perencanaan ini harus memperhatikan dan anggaran yang dimiliki oleh organisasi.

2) Fungsi penganggaran

Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan perolehan barang sesuai dengan anggaran yang ada. Jika biaya penganggaran logistik tidak sesuai dengan anggaran maka diperlukan perubahan perencanaan.

3) Fungsi pengadaan

Pada dasarnya pengelolaan logistik lebih fokus pada perolehan barang dan bersifat wajib. Ketika terjadi budget mismatch dan sulit untuk mengubah rencana, maka pengelola logistik harus berimprovisasi untuk mengelola kegiatan logistik dengan anggaran terbatas.

4) Fungsi penyimpanan dan distribusi

Proses di mana barang-barang yang telah diperoleh disimpan di tempat yang tepat. Selain itu, barang-barang yang telah didistribusikan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan operasi standar.

5) Fungsi pemeliharaan

Proses pengelolaan logistik juga mencakup pemeliharaan barang. Secara umum tujuan pemeliharaan barang logistik adalah agar barang yang disimpan tidak cepat rusak.

6) Fungsi penghapusan

Dalam kegiatan pengelolaan logistik juga terdapat kegiatan penghapusan. Fungsi penghapusan adalah untuk memisahkan barang yang rusak, memperbaiki barang yang rusak serta mengganti barang yang rusak dengan yang benar.

7) Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian dilakukan oleh seorang manajer logistik secara bertahap sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut di atas. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi manajemen logistik dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Manajemen logistik pemilu terdiri dari enam kegiatan yaitu: perencanaan logistik pemilu, spesifikasi teknis setiap jenis logistik pemilu, proses pengadaan (*procurment*), proses produksi alat kelengkapan pemilu (*election material production*), jaminan kualitas (*quality control*), penyimpanan (*storages*) dan proses distribusi alat kelengkapan pemilu (*election material distribution*) (Barkati, 2014). Membahas mengenai manajemen logistik pemilu untuk menilik sejauh mana keoptimalan manajemen logistik pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palembang yaitu dengan menggunakan pendekatan fungsi manajemen dari George R. Terry (Zanah dan Sulaksana, 2016) memiliki fungsi sebagai berikut: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan Pengawasan (*controlling*)

### 2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*Management*” yang berakar kata “*Manage*” yang berarti “*control*” dan “*succeed*” Sukses, inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan (Toriquddin & Rauf, 2013). Menurut George R. Terry berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Syahputra & Aslami, 2023). Selanjutnya Torang (Syahputra & Aslami, 2023) berpendapat bahwa manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu maupun kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen memerlukan sumber daya manusia, pengetahuan dan keterampilan agar aktivitas tersebut menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan sehingga tidak ada organisasi yang akan sukses tanpa menggunakan manajemen yang baik.

Beberapa pakar lainnya mengemukakan pendapat mengenai manajemen itu sendiri, menurut Suhariadi (2013) manajemen merupakan proses pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya, baik sumber daya material, finansial, metode maupun sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan sehingga diperlukan proses pengintegrasian, koordinasi dan pembagian tugas diantara sumber daya yang tersedia dalam organisasi tersebut.

### 2.1.2 Fungsi Manajemen

Adapun fungsi dasar manajemen yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan) keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC Berikut ini akan dijelaskan fungsi manajemen menurut George R. Terry (Zanah dan Sulaksana, 2016) yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Sondang P. Siagian (Zanah dan Sulaksana, 2016) perencanaan adalah fungsi yang sangat vital yang bukan hanya tugas seorang pemimpin tetapi juga harus melibatkan setiap orang dalam sebuah organisasi guna menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan juga proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dengan alternatif-alternatif yang ada (Tangkudung et al., 2016). Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud mencapai tujuan.

Perencanaan juga merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan. Siagian (Zanah dan Sulaksana, 2016) menjelaskan juga perencanaan (*planning*) merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Fungsi dari perencanaan tersebut adalah menjelaskan berbagai masalah, menentukan prioritas masalah, menentukan tujuan dan indikator keberhasilan, mengkaji hambatan dan kendala dan menyusun rencana kerja operasional.

Adapun manfaat perencanaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang.
- b) Dimungkinkan melakukan pilihan dari berbagai alternatif tindakan.
- c) Mengarahkan perhatian pada tujuan.
- d) Merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan.
- e) Memudahkan melakukan koordinasi antara berbagai organisasi.

- f) Meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, sehingga menghemat waktu, usaha dan dana.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan ini. Penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Adapun tentang asas-asas organizing (Herujito, 2001) yaitu sebagai berikut:

- 1) *The objective* atau tujuan
- 2) *Departementation* atau pembagian kerja
- 3) *Assign the personal* atau penempatan tenaga kerja
- 4) *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab
- 5) *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang akan melingkupinya. Menurut Siagian, pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian



mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan. Selanjutnya siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas satu pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien.

Terdapat beberapa aspek penting dalam proses pengorganisasian yaitu:

1. Bagan organisasi formal
2. Pembagian kerja
3. Departementalisasi
4. Rantai perintah atau kesatuan perintah
5. Tingkat-tingkat hirarki manajemen
6. Rentang manajemen dan kelompok informal yang dapat dihindarkan.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Menurut George R. Terry (Zanah dan Sulaksana, 2016) pelaksanaan/penggerakan yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan dilakukan setelah fungsi perencanaan supaya pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan maka sangat ditekankan pada bagaimana cara seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahannya (Zanah dan Sulaksana, 2016).

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi tersebut terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya (Herujito, 2001).

Mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*, hal ini tentu merupakan *mis management* (Herujito, 2001). Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik melainkan juga tergantung pada pergerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya pergerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standar, metode kerja, prosedur dan program (Herujito, 2001). Adapun faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan (Herujito, 2001) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Leadership* (kepimpinan)

- 2) *Attitude and morale* (tata hubungan)
- 3) *Incentive* (perangsang)
- 4) *Supervision* (supervisi)
- 5) *Discipline* (disiplin)

d. Pengawasan (*controlling*)

Menurut Stephen Robien (Zanah dan Sulaksana, 2016) pengawasan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Pengawasan memiliki peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Meskipun *planning, organizing, actuating* tersebut baik namun pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Kontrol mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Herujito, 2001).

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standard (ukuran) dengan proses pengawasan sebagai berikut:

- 1) *Determining the standard of basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
- 2) *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
- 3) *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)

- 4) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat) (Herujito, 2001)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dalam arti apakah pengawasan membandingkan antara kenyataan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana yang telah disusun (Herujito, 2001).

## 2.2 Pengertian Evaluasi

Menurut Bryan, caroline (1987) evaluasi merupakan upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, sederhananya evaluasi adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan Shertzer dan Stone (Sholahudin, 2013) berpendapat bahwa evaluasi diartikan sebagai proses menentukan kesesuaian pada produk, tujuan, prosedur, program, pendekatan dan fungsi. Selanjutnya pendapat William N. Dunn (Zulkarnaen, Fitriani, Sadarman, et al., 2020) istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Hal yang sama menurut Taliziduhu (Istianda dan Zastrawati, 2021) berpendapat evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis terhadap hasilnya.

Berikutnya dikemukakan oleh Adi Nugroho (Saleh, 2019) evaluasi merupakan suatu proses menjamin bahwa tujuan-tujuan manajemen telah tercapai atau belum dengan demikian suatu evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan suatu kerja yang dilakukan sebelumnya, tanpa adanya proses

evaluasi maka suatu pekerjaan akan berakhir tanpa ada hasil yang berarti. Evaluasi sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang berusaha untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana dan mengukur seobjektif mungkin dari hasil pelaksanaan dengan ukuran yang dapat diterima pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung dari suatu perencanaan (Martin dan Firman, 2010).

### **2.2.1 Fungsi Evaluasi**

Evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting sebagaimana (Zulkarnaen, Fitriani, Sadarman, et al., 2020) yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu.
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- c. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain.

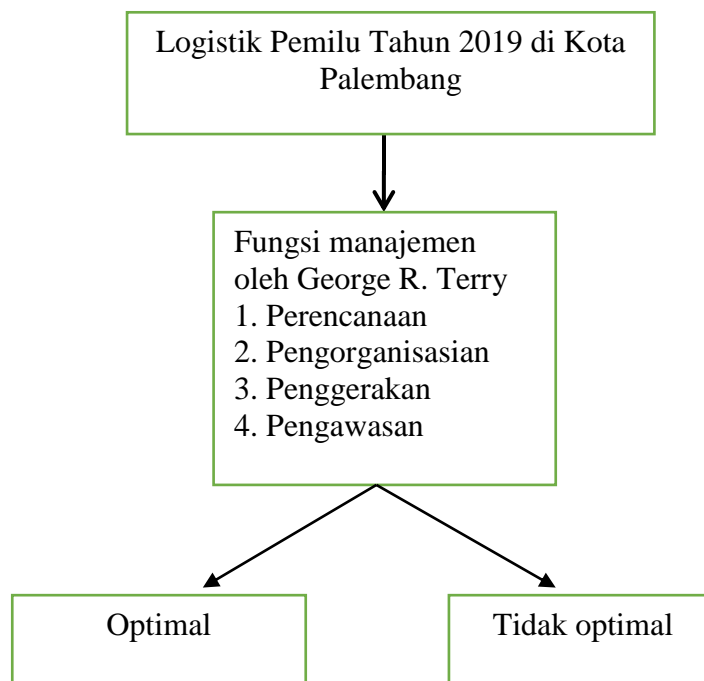
### **2.2.2 Jenis Evaluasi**

Adapun jenis evaluasi menurut Finterbusch dan Motz (Wibawa, 1994) yaitu sebagai berikut:

1. *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program.
2. *Single program before-after*, merupakan program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
3. *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tetapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarnya
4. *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Evaluasi manajemen logistik pemilu dalam tesis ini hanya meliputi alat kelengkapan pemungutan suara dan dukungannya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kota Palembang. Berdasarkan definisi-definisi diatas dalam tesis ini tinjauan pustaka di atas maka kerangka berfikir dalam tesis dapat disederhanakan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan kerangka berfikir



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, metode deskriptif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang telah diteliti.

Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam mengevaluasi manajemen logistik pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang yang masih terdapat kekurangan surat suara pemilu, surat suara pemilu tertukar antar dapil dan surat suara pemilu yang salah cetak pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palembang dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen dari George R. Terry yang meliputi: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif harus memperhatikan masalah dan fokus penelitian di mana fokus memberikan suatu batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga penelitian akan terfokus untuk memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2013) bahwa gejala dalam penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh/tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif

memiliki masalah yang luas, sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah oleh peneliti dengan membatasi satu atau lebih variable. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Menurut Creswell (Tresiana, 2013) bahwa topik atau fokus merupakan “konsep utama” yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Topik atau fokus dapat saja muncul dari literatur atau dikembangkan melalui pengalaman nyata.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi manajemen logistik pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang yang masih terdapat kekurangan surat suara pemilu, surat suara pemilu tertukar antar dapil dan surat suara pemilu yang salah cetak pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palembang dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen dari George R. Terry yang meliputi: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*)

### 3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menyediakan data penelitian atau dari siapa dan dimana data penelitian itu (Muharto. S, 2016). Menurut Miles dan Huberman (Silalahi, 2012) menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Berikutnya sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari pelaku yang disebut *first hand information*, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012).

Mengenai sumber data penelitian ini, peneliti mengkategorikan ke dalam dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data dari sumber langsung dari informan dengan wawancara.

2. Sumber data sekunder



Data sekunder penelitian ini yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari literatur atau dokumen-dokumen, jurnal, artikel, berita dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan logistik pemilu pada penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 di kota Palembang.

Data-data dalam penelitian ini baik berupa data primer maupun data sekunder digunakan dalam menyusun deskripsi menyeluruh mengenai evaluasi manajemen logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palembang. Deskripsi ini menjadi landasan peneliti mengevaluasi fungsi-fungsi manajemen dari George R. Terry yang meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) dalam logistik pemilu Tahun 2019 yang sesuai dengan asas-asas logistik pemilu yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat peruntukan, tepat kualitas dan tepat sasaran. Pemilihan metode kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mengeksplorasi data dan mengembangkan penelitian secara lebih fleksibel dibandingkan metode penelitian lainnya.

#### **3.4. Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan agar mendapatkan informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi, di mana peneliti menentukan informan yang memiliki kriteria tertentu guna menjawab permasalahan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013a) dengan kata lain pemilihan informan dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013a). Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan non kunci, Informan kunci merupakan orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang tengah diteliti, sedangkan informan non

kunci yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti (Sugiarti.Andalas.E, E, Setiawan, 2020).

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kota Palembang, Anggota KPU Propinsi Sumatera Selatan, pegawai Sekretariat KPU Kota Palembang, anggota Bawaslu Kota Palembang, pegawai sekretariat Bawaslu Kota Palembang, Informan non kunci adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ilir Timur II, Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ilir Barat Iserta pemilih di TPS di Kecamatan Ilir Timur Iserta di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### **1. Teknik Wawancara**

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam (*depth interview*) dengan informan untuk mendapatkan data primer berdasarkan pedoman wawancara dengan semi terstruktur. Peneliti menggunakan semi terstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya dengan demikian pelaksanaan wawancaranya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga timbul keakraban antara peneliti dengan informan yang pada akhirnya memudahkan peneliti dalam menghimpun data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data dari wawancara dapat dilihat dalam tabel 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4 : Teknik pengumpulan data dan Objek Penelitian**

<b>Teknik pengumpulan Data</b>	<b>Objek Penelitian</b>
Wawancara dengan Ketua KPU Kota Palembang, Anggota KPU Propinsi Sumatera Selatan, Pegawai sekretariat KPU Kota Palembang	Implementasi manajemen logistik pemilu Tahun 2019 di tingkat KPU Kota Palembang
Wawancara dengan anggota Bawaslu Kota Palembang, Pegawai sekretariat Bawaslu Kota Palembang	Ajudikasi pengawasan logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang
Wawancara dengan anggota PPK Ilir Timur II, anggota KPPS Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	Implementasi manajemen logistik Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palembang
Wawancara dengan Pemilih di TPS Kelurahan Siring Agung, Kelurahan Srijaya, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II	Pengguna hak pilih di tempat pemungutan suara di TPS pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang

Sumber : Hasil Olahan, 2023

## 2. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) bahwa teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dengan kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen peraturan perundang-undangan yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, laporan kegiatan distribusi logistik Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang, artikel ilmiah, berita media online, foto dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian dan teknik dokumentasi ini yang digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara.

### 3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh di lapangan.

Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Huberman dan Miles (Hartono, 2018) menawarkan bentuk analisis data melalui tiga alur aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Penarikan kesimpulan verifikasi merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti (Hartono, 2018).

### **3.7. Teknik Keabsahan Data**

Menurut Emzir (2011) bahwa teknik keabsahan data adalah merujuk pada kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Supaya dapat dipertanggungjawabkan data-data yang diperoleh perlu diperiksa terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi yaitu menurut Sugiyono (2013) bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada jika penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Selanjutnya Sugiyono (2013) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan wawancara yang mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan dari KPU Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang, Badan Ad

hock dan juga pemilih. Peneliti selanjutnya melakukan teknik triangulasi data sebagai langkah keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan logistik Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang sudah berjalan dengan baik. Perencanaan tersebut terdiri dari perencanaan penyimpanan logistik pemilu, perencanaan penerimaan logistik pemilu, perencanaan kegiatan penyortiran, pelipatan, pengesetan, pengepakan logistik pemilu dan perencanaan mekanisme distribusi logistik pemilu. Dari keseluruhan perencanaan tersebut di bagian perencanaan penyimpanan logistik pemilu tidak optimal dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyiapkan gudang logistik pemilu yang representatif yang dapat menampung keseluruhan logistik pemilu serta lokasi gudang tidak berada dalam satu kawasan. Sehingga menyulitkan mengelola logistik pemilu serta melakukan pengawasan.
2. Pengorganisasian logistik Pemilu Tahun 2019 di KPU Kota Palembang sudah berjalan dengan baik di mana seluruh pegawai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai *job desk* namun tidak optimal dikarenakan jumlah pegawai sekretariat KPU Kota Palembang yang terbatas dalam melaksanakan tugas pengelolaan logistik pemilu.
3. Penggerakan logistik Pemilu Tahun 2019 di KPU Kota Palembang sudah berjalan baik sesuai dari perencanaan mulai dari pelaksanaan penyimpanan logistik pemilu, pelaksanaan penerimaan logistik pemilu, pelaksanaan kegiatan penyortiran, pelipatan, pengesetan dan pengepakan hingga pelaksanaan mekanisme distribusi logistik pemilu namun tidak optimal dikarenakan masih terdapat kekurangan surat suara pemilu, surat suara tertukar antar dapil dan surat suara salah cetak sehingga dilaksanakannya pemungutan suara lanjutan di sejumlah TPS.

4. Pengawasan logistik Pemilu Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik mulai dari pengawasan internal dari KPU Kota Palembang maupun pengawasan eksternal dari Bawaslu Kota Palembang namun tidak optimal dikarenakan keterbatasan jumlah pengawas untuk melakukan pengawasan terutama di bagian penyortiran, pelipatan, pengesetan dan pengepakan logistik Pemilu Tahun 2019.

## 5.2 Saran

Peneliti menyarankan hal-hal yaitu sebagai berikut:

1. KPU Kota Palembang sebaiknya berkoordinasi dengan pihak pemerintah maupun melakukan kerja sama dengan pihak BUMN/Swasta untuk penyediaan gudang logistik pemilu yang representatif serta memenuhi standar yang dapat menampung seluruh logistik pemilu dan gudang tersebut berada di satu kawasan supaya memudahkan pengelolaan logistik pemilu maupun pengawasannya.
2. KPU Kota Palembang seyogyanya lebih selektif lagi dalam memperkerjakan petugas sortir, pelipatan dan pengepakan logistik pemilu yang memenuhi kualifikasi dan KPU Kota Palembang dapat merekrut petugas sortir, pelipatan dan pengepakan logistik pemilu dari kalangan mahasiswa dengan menjalin kerja sama dari beberapa pihak perguruan tinggi yang berada di Kota Palembang sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.
3. KPU Kota Palembang sebaiknya mengusulkan penambahan pegawai sekretariat KPU Kota Palembang yang dapat memenuhi bidang pengelolaan logistik pemilu kepada Sekretariat Jenderal KPU RI, mengingat Kota Palembang memiliki jumlah pemilih terbesar di Propinsi Sumatera Selatan dengan ribuan TPS yang tentunya pengelolaan logistik pemilu memerlukan sumber daya manusia yang menguasai teknis dan kompetensi pengelolaan logistik pemilu.
4. KPU Kota Palembang seyogyanya dalam tahap pengawasan dapat menambah pengawas secara rasional dengan pekerja yang melaksanakan kegiatan sortir, pelipatan dan pengepakan. Pekerja tersebut sebelum

melakukan pekerjaannya dapat diberikan pelatihan khusus teknis pengelolaan logistik pemilu.

5. Peneliti sadar masih terdapat banyak keterbatasan dalam penelitian ini, dari segi waktu, pengumpulan datadan lain sebagainya sehingga dalam penelitian selanjutnya peneliti lainnya dapat lebih memperdalam kajian penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y. (2019a). *Distribusi logistik pemilu di Palembang sesuai target*. Antaranews.Com.  
<https://www.antaranews.com/berita/831802/distribusi-logistik-pemilu-di-palembang-sesuai-target>
- Abdullah, Y. (2019b). *KPU Palembang libatkan 300 tenaga pelipat surat suara Pemilu 2019*. Antaranews.Com.  
<https://sumsel.antaranews.com/berita/361645/kpu-palembang-libatkan-300-tenaga-pelipat-surat-suara-pemilu-2019>
- Adam, M., & Prautomo, A. (2020). *Tantangan Logistik Raksasa dengan Sedikit Cegukan Citra Metaforis Pemilu Indonesia 2019*. 509(Icollite), 456–462.
- Aja, E. P. (2021). *Managemen Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Manggarai*.
- Ardipananto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XI No 11/O.
- Barkati, zainal, I. (2014). *Manajemen distribusi logistik Pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Malinau, studi tentang Pemilu berintegritas*.
- Barkati, Z. I. (2018). *Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau: Studi Tentang Pemilu Berintegritas*. 1–11.
- Boediningsih, W., & Budi Cahyono, S. (2022). Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 288–301. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48>
- Bryan, caroline, L. G. W. (1987). *Manajemen pembangunan untuk negara berkembang*. LP3ES.
- Budiasa, I. K. (2021). *Beban Kerja dan Kinerja Sumber Daya Manusia*. E-Book Edisi Pertama, Pena Persada, Indonesia (Issue July).
- Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu. *Jurnal Warta*, 53(9), 1679–1699.  
<https://media.neliti.com/media/publications/290701-implementasi-poac-terhadap-kegiatan-orga-bdca8ea0.pdf>
- Delmana, L. P. (2020). Evaluasi dan perbaikan desain distribusi logistik pemilu melalui penerapan manajemen logistik 4.0. *Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 26–50.

- Efriza. (2019). Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Sistem Presidensial. *Jurnal Renaissance*, 4(01), 495–503.  
<http://ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/view/92>
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT Raja Grafindo Persada.
- Erfizal, R. (2019). *Antusias Warga Kurang, Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 11-12 Kelurahan Sei Buah Palembang Sepi*. Sripoku.Com.  
<https://palembang.tribunnews.com/2019/04/27/antusias-warga-kurang-pemungutan-suara-lanjutan-di-tps-11-12-kelurahan-sei-buah-palembang-sepi>.
- Fadhilah, F., Firdiansyah Suryawan, R., Suryaningsih, L., & Lestari, L. (2022). Teori Gudang Digunakan Dalam Proses Pergudangan (Tinjauan Empat Aspek). *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviasi*, 1(2), 153–156.  
<https://doi.org/10.52909/jtla.v1i2.63>
- Gaffar, A. (2000). *Politik Indonesia:Transisi menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Ghoniayatun, S. (2023). *Tata Kelola Logistik Pemilu dan Pilkada Membangun Profesionalisme Pengelolaan Logistik di DIY : Manajemen Logistik Untuk Meminimalisir dan Menghadapi Electoral Disputes*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Gloria. (2019). *Sistem Pemilu Serentak Hadapi Banyak Kendala Fisik dan Teknis*. Ugm.Ac.Id.  
<https://ugm.ac.id/id/berita/17879-sistem-pemilu-serentak-hadapi-banyak-kendala-fisik-dan-teknis/%0A%0A>
- Hani, A. R. (2023). *Tata Kelola Logistik Pemilu dan Pilkada Membangun Profesionalisme Pengelolaan Logistik di DIY: Catatan Perencanaan Distribusi Logistik Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Hartono, J. (2018). *Metode pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Hermawan, E. (2022a). Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres Kerja, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja PT. Sakti Mobile Jakarta. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(2), 173–180. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>
- Hermawan, E. (2022b). Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres Kerja, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja PT. Sakti Mobile Jakarta. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(2), 173–180.
- Herujito, Y. M. (2001). *Dasar-dasar Manajemen*. Grafiabdi Persada.
- Hidayaturrehman, M., & Ubaid, A. H. (2021). *Kutukan Demokrasi*. Literindo Berkah Jaya.
- Husaini, A. (2017). Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. *Warta*, 51.

- Idrus, S. U. (2019). *KPU Palembang butuh 45 hari lipat surat suara*. Antaranews.Com.  
<https://www.antaranews.com/berita/793076/kpu-palembang-butuh-45-hari-lipat-surat-suara>
- Ilham Teguh, L. M. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia: teori, konsep dan Isu strategis*. Rajawali Pers.
- Indonesia, K. P. U. R. (2017). *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Indonesia, K. P. U. R. (2019a). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum nomoe 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tuna netra*.
- Indonesia, K. P. U. R. (2019b). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03-1 Kpt/07/KPU/III/2019 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 900/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum*.
- Indonesia, K. P. U. R. (2019c). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Niomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum*.
- Indonesia, K. P. U. R. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024*.
- Indonesia, K. P. U. R. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum*.
- Indonesia, P. R. (2017a). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Indonesia, P. R. (2017b). *Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017*.
- Inge, N. (2019a). *Sempat Kehabisan Surat Suara, Ratusan Warga Palembang Ikut Pemilu 2019 Susulan*. Liputan6.Com.  
<https://www.liputan6.com/regional/read/3946741/sempat-kehabisan-surat-suara-ratusan-warga-palembang-ikut-pemilu-2019-susulan>
- Inge, N. (2019b). *Sempat Kehabisan Surat Suara, Ratusan Warga Palembang Ikut Pemilu 2019 Susulan*. Liputan6.Com.

- Istianda, M., & Zastrawati, A. (2021). Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Kota Makassar. *Sebatik*, 25(1), 92–101.  
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1203>
- Jati, R. P. (2019). *Kekurangan Surat Suara Kemungkinan karena "Human Error"*. Kompas.Id.  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/07/09/kekurangan-surat-suara-kemungkinan-karena-human-error>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Khalyubi Wildhan, Amrurobi Abdi Azka, P. T. E. M. (2020). Manajemen Krisis Pendistribusian Logistik Dalam Pilkada Kota Depok Di Tengah Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1).  
<https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.204>
- Khoirunnisa, N. A. (2020). Penataan Jadwal Kesenjangan Pemilu Dan Implikasinya Terhadap Manajemen Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 61–81.
- KPU, B. T. dan H. (2019). *Panduan KPPS: Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Lumban Gaol, E. Y. (2022). Manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan Distribusi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 966–976. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1336>
- Mariska, R., Kusmanto, H., & Fadli, F. (2021). Analisis Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan. *Perspektif*, 10(1), 110–119.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4143>
- Martin., F. dan. (2010). *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu sistem proyek pembangunan*. Bumi Aksara.
- Moleong. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muharto. S, A. (2016). *Metode Penelitian sistem informasi: Mengatasi kesulitan Mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian*. Deepublish.
- Muntaha, S. (2019). *Khawatir Surat Suara Tertukar, KPU Palembang Segera Rekrut SDM Khusus*. Fornews.Co.  
<https://fornews.co/news/khawatir-surat-suara-tertukar-kpu-palembang-segera-rekrut-sdm-khusus/>
- Norris, P. (2013). The new research agenda studying electoral integrity. *Electoral Studies*, 32.
- Palembang, B. K. (2020). *Peta batas administrasi Kota Palembang*.  
<https://bappedalitbang.palembang.go.id/peta-batas-administrasi-kota-palembang.html>

- Palembang, B. P. S. K. (n.d.). *Kepadatan penduduk Kota Palembang Tahun 2019, 2020, 2021*. 2021.  
<https://palembangkota.bps.go.id/indicator/12/39/1/kepadatan-penduduk.html>
- Palembang, B. P. S. K. (2019). *Luas setiap kecamatan di Kota Palembang*.  
<https://palembangkota.bps.go.id/indicator/153/183/1/luas-wilayah.html>
- Palembang, B. P. S. K. (2022). *Jumlah Penduduk Kota Palembang tahun 2019,2020,2021*. Badan Pusat Statistik Kota Palembang.  
<https://palembangkota.bps.go.id/indicator/12/167/1/jumlah-penduduk-palembang.html>
- Palembang, P. N. (2019). *Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1071/Pid.B/2019/PN PLG*.
- Parakkasi, P. (2017). Disiplin kerja aparatur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis*, 5 Nomor 2, 116–124.
- Prakoso, C. T. (2019). *Laporan Hasil Riset Pemilu 2019 Manajemen Logistik Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur*.
- Prayitno, D., & Fairus, F. A. (2022). *Manajemen Logistik Tim Reaksi Cepat ( TRC ) di BPBD Kabupaten Gunung Kidul : Kinerja Dan Kendala*. 2, 94–106.
- Putra, A. Y. (2022a). *Profil Kota Palembang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Kompas.Com.  
<https://regional.kompas.com/read/2022/08/09/191556578/profil-kota-palembang-ibu-kota-provinsi-sumatera-selatan?page=all>
- Putra, A. Y. (2022b). *Profil Kota Palembang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Kompas.Com.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting? *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
- RI, P. badan pengawas pemilihan umum. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- RI, P. K. P. U. (2019). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum*.
- Saleh, A. M. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif. *Katalogis*, 4 Nomor 11, 10–20.
- Samsuni. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Al Falah*, 17 no 31(31), 113–124. <http://ejurnal.staialfalabjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/19>
- Santoso, T. (2019). *Pemilu di Indonesia:Kelembagaan dan Pengawasan*. Sinar

Grafika.

- Sari, D. R., & Hertanto, A. W. (2018). Manajemen Strategi Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 133–142.  
[http://repository.lppm.unila.ac.id/26483/1/JASP VOL 4 JULI 2020.pdf#page=37](http://repository.lppm.unila.ac.id/26483/1/JASP_VOL_4_JULI_2020.pdf#page=37)
- Sarolangun, K. P. U. K. (2019). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: : 41/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/II/2019 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelaksanaan penyortiran, pelipatan, pengesetan, perakitan, bongkar muat dan penghitungan surat suara ke dalam* .
- Sholahudin, M. (2013). *Evaluasi Kinerja Guru (Manajemen Evaluasi Peningkatan Profesionalitas Guru)*. 1(1), 123–144.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Siregar, R. A. (2019). *TNI-Polri Kawal Pengiriman Surat Suara di Perairan Sungai Musi*. DetikNews.  
<https://news.detik.com/berita/d-4512940/tni-polri-kawal-pengiriman-surat-suara-di-perairan-sungai-musi>.
- Situmorang, S. S. (2019). Perihal pemungutan dan penghitungan suara. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Pemungutan Dan Penghitungan Suara*, 245–270.
- Sugiarti.Andalas.E, E, Setiawan, A. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif sastra*. UMMPress.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013b). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Suhariadi, F. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam pendekatan teoritis-praktis*. Airlangga University Press.
- Sukwiaty, D. (2016). *Ekonomi*. Yudhistira.
- Suprpto, H. (2019). *Rabu, KPU Palembang Mulai Lipat Surat Suara Untuk Pemilu 2019*. Sumselupdate.Com.  
<https://sumselupdate.com/rabu-kpu-palembang-mulai-lipat-surat-suara-untuk-pemilu-2019/>
- Surbakti, R. (2011). *Menjaga integritas pemungutan dan penghitungan suara*. Kemitraan.
- Surbakti, R. (2016). Perencanaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis. *Kemitraan Partnership*, 1(May), 32.

- Sutisna, N. W., & Effane, A. (2022). Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana. *Jurnal Karimah Tauhid*, 1(2), 227–233.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51–61.
- Tangkudung, A. J., Halid, A., & Saleh, Y. (2016). Analisis Penerapan Manajemen dan Strategi Distribusi Beras di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo). *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 1(1), 1–16.
- Toriquddin, M., & Rauf, A. (2013). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(1), 29–41. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2993>
- Tresiana, N. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Trisanti, I. (2014). *Surat suara tertukar dalam Pemilu legislatif tahun 2014 di Jawa Timur*. 171(6), 727–735. <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- Tsauri, S. (2013). *MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*. STAIN Jember Press.
- Umum, K. P. (2017). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:153/PP.01-KPT/01/KPU/IX/2017 tentang Standar tim pelaksana kegiatan/Kelompok Kerja di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota*.
- Umum, K. P. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Umum, K. P. (2019a). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/PP.10-4/Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum*.
- Umum, K. P. (2019b). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019*.
- Urban. (2019). *KPU Palembang Musnahkan 18.638 Lembar Surat Suara di Malam Hari*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/urbanid/kpu-palembang-musnahkan-18-638-lembar-surat-suara-di-malam-hari-1qtsemX9v1o/full>

- Vikaliana Resista, I. N. purnaya. (2020). Analisis Standar Minimal Pergudangan Pada Logistik Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Administrasi Dan Manajemen*.  
<http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/index>
- Wahdaniah, & Gunardi, A. (2018a). Pengaruh Beban Kerja Dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 1(1), 51–65. <http://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandar>
- Wahdaniah, & Gunardi, A. (2018b). Pengaruh Beban Kerja Dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 1(1), 51–65.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. PT. Raja Grafindo Persad.
- Widodo, H. (2023). *Tata Kelola Logistik Pemilu dan Pilkada, membangun Profesionalisme pengelolaan logistik di DIY : Kebutuhan Gudang Logistik Pemilu Serta Pengamanannya*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Wijaya, Y. S. (2019). *Pemilu 2019: Pemungutan suara Indonesia paling “rumit” dan “menakutkan” di dunia*. [www.Bbc.Com](http://www.Bbc.Com).  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47879833>
- Wijayanti, I. D. S. (2008). *Manajemen*. Mitra Cendika Press.
- Zanah, R. F. M., & Sulaksana, J. (2016). Pengaruh Fungsi Manajemen terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Suatu Kasus di Home Industri Asri Rahayu di Wilayah Majalengka). *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Peternakan*, 4(2), 157–166.
- Zulkarnaen, W., Dewi Fitriani, I., Sadarman, B., Yuningsih, N., Muhammadiyah Bandung, S., & Tasikmalaya, S. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 244–264.  
<http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/373>
- Zulkarnaen, W., Dewi Fitriani, I., Yuningsih, N., Muhammadiyah Bandung, S., & Tasikmalaya, S. (2020). *Pengembangan supply chain management dalam pengelolaan distribusi logistik yang lebih tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu berbasis human resources competency development di KPU Jawa Barat*. 4(2).